**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Skripsi yang berjudul “Analisis Dampak *Black Campaign* Minyak Kelapa Sawit (CPO) terhadap *Volume* Ekspor CPO Indonesia” karya dari Marsha Dewi Putri, program studi ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Dimana fokus kajian ini membahas tentang perkembangan volume permintaan ekspor CPO Indonesia serta dampak yang ditimbulkan oleh adanya *Black Campaign* CPO terhadap volume permintaan ekspor CPO Indonesia. Periode yang dianalisis dalam penelitian tersebut mulai dari tahun 1996 sampai dengan 2011. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Black Campign*, nilai tukar riil rupiah terhadap mata uang negara importir, GDP riil per kapita negara importir, harga internasional minyak kedelai (*soybean oil*) di pasar dunia dan harga ekspor CPO Indonesia ke negara tujuan berpengaruh nyata terhadap *volume* permintaan ekspor CPO Indonesia. Sedangkan *Black Campaign*, harga ekspor CPO Indonesia ke negara tujuan dan nilai tukar riil rupiah terhadap negara importir berhubungan negatif terhadap *volume* ekspor CPO Indonesia.

Jurnal yang berjudul “Upaya Hambatan Non-Tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia” karya dari Adelita Sukma Kusumaningtyas, program studi ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Dimana fokus kajian ini membahas tentang alasan Uni Eropa melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia walaupun minyak kelapa sawit Indonesia telah memiliki CSPO (*Certified Sustainable Palm Oil*). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Uni Eropa Uni melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia didasari alasan karena Uni Eropa mengalami kegagalan persaingan antara minyak kelapa sawit Indonesia yang notabene telah menjadi industri besar dalam dunia minyak nabati, sedangkan minyak bunga matahari dan minyak *rapeseed* masih dalam kategori *infant industry* yang belum memiliki akar perdagangan yang cukup kuat untuk bersaing dalam pasar internasional sehingga dibutuhkan peran pemrerintah untuk mengatasi hal tersebut agar *infant industry* tersebut dapat bersaing dengan minyak kelapa sawit Indonesia. Selain itu faktor lainnya adalah adanya tekanan dari *Greenpeace* and WWF yang bertindak sebagai *environmental advocacy networks* dengan tujuan untuk merubah kebijakan Uni Eropa.

Jurnal yang berjudul “Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa” karya dari Novian Uticha Sally, dosen jurusan ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, Internasional Universitas Batam. Dimana fokus kajian tersebut membahas mengenai upaya Indonesia menangani isu-isu terkait minyak sawit di Uni Eropa. Hasil dari penelitian tersebut terbukti bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Uni Eropa bertentangan dengan hasil temuan, yakni minyak sawit Indonesia dikatakan memiliki lemak jenuh yang tinggi, pengelolaan yang buruk, dan juga pembukaan lahan yang mengakibatkan pemanasan global serta deforestasi. Sedangkan pada kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan oleh Uni Eropa. Dalam jurnal tersebut menyarankan agar Pemerintah dapat segera memberikan sertifikasi bagi produk sawit Indonesia supaya sesuai dengan standar Eropa sehingga minyak sawit Indonesia dapat bersaing dengan sehat kembali di pasar Uni Eropa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penulis telah membandingkan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Literatur Review

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Judul Penelitian | Isi Penelitian | Perbandingan dengan Penelitian Penulis |
| 1. | Analisis Dampak *Black Campaign* Minyak Kelapa Sawit (CPO) terhadap *Volume* Ekspor CPO Indonesia | Perkembangan volume permintaan ekspor CPO Indonesia serta dampak yang ditimbulkan oleh adanya *Black Campaign* CPO terhadap volume permintaan ekspor CPO Indonesia. Periode yang dianalisis dalam penelitian tersebut mulai dari tahun 1996 sampai dengan 2011. | Mengetahui dampak adanya *Negative Campaign serta m*enggambarkan upaya diplomasi Indonesia dalam hal mendorong ekspor CPO ke pasar Uni Eropa, dilihat dari periode tahun 2012 sampai tahun 2016. |
| 2. | Upaya Hambatan Non-Tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia | Menjelaskan alasan mengapa Uni Eropa dan *Greenpeace* (salah satu NGO yang melakukan kampanye hitam terhadap CPO Indonesia) melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia walaupun minyak kelapa sawit Indonesia telah memiliki CSPO (*Certified Sustainable Palm Oil*). | Lebih menitik beratkan pada dampak yang dirasakan oleh CPO Indonesia akibat adanya *Negative Campaign* Uni Eropa serta upaya Indonesia membuktikan tuduhan yang dilakukan Uni Eropa terhadap CPO Indonesia. |
| 3. | Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa | Menggambarkan isu-isu terkait minyak sawit di Uni Eropa serta alasan Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap CPO di Indonesia. | Menggambarkan langkah yang dilakukan Indonesia agar CPO dalam negeri mampu bersaing dan masuk ke pasar Uni Eropa dengan cara menyesuaikan sistem produksi CPO untuk memenuhi tuntutan standar pasar Uni Eropa. |

1. **Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah penelitian pada Skripsi ini, penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori-teori dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan penulis teliti. Untuk menganalisa setiap persoalan yang ada di dalam hubungan internasional, maka perlu diketahui apa definisi dari hubungan internasional itu sendiri.

Pada pasca-Perang Dingin, Joshua Goldsten (1996) mendefinisikan studi HI sebagai disiplin ilmu yang menjadi bagian dari ilmu politik, tepatnya politik internasional, yang mempelajari tentang:

**“*Government decisions concerning their actions toward other governments…(a study about) international politics, that is political relations among nations in terms of war, diplomacy, trade relations, alliance, participation in international organizations, cultural exchanges, and so forth.***

**(Keputusan-keputusan pemerintah menyangkut tindakan mereka terhadap pemerintah lainnya … HI juga merupakan studi tentang politik internasional, yakni hubungan politik antar bangsa dalam hal peperangan, diplomasi, hubungan perdagangan, aliansi, partisipasi dalam organisasi internasional, pertukaran budaya, dan seterusnya).”[[1]](#footnote-1)**

Negara maupun non-Negara merupakan aktor dalam suatu Hubungan Internasional yang saling berinteraksi dan akan saling mempengaruhi setiap negara yang melaksanakannya. Seperti halnya Indonesia dan Uni Eropa yang merupakan dua negara yang saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai tujuannya masing-masing dengan cara melakukan kerjasama. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa adalah kerjasama di bidang ekonomi. Sehingga dalam penelitian ini dibutuhkan teori mengenai Ekonomi Politik Internasional. Ekonomi Politik Internasional didefinisikan sebagi berikut:

**“Ekonomi Politik Internasional merupakan suatu kegiatan antara individu-individu maupun perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perdagangan yang melintasi batas. Ekonomi Politik Internasional menimbulkan kepentingan-kepentingan negara atau perusahaan untuk menguatkan ekonomi agar mampu bersaing dengan negara atau perusahaan di negara lain. Dengan kepentingan seperti itu maka memunculkan persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh masalah-masalah khusus yang terjadi pada interaksi ekonomi antara negara-negara berdaulat seperti keuntungan perdagangan, pola perdagangan, proteksionis, neraca pembayaran, penentuan nilai tukar, koordinasi kebijakan internasional, dan pasar modal internasional.”[[2]](#footnote-2)**

Ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik diberbagai negara dengan ekonomi internasional atau sebaliknya. Bentuk interaksi atau kerjasama yang dilakukan antar negara bisa berupa perdagangan atau lebih dikenal dengan Perdagangan Internasional.Perdagangan Internasional sendiri didefinisikan sebagai berikut:

**“Perdagangan Internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainatas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa:**

1. **Antar perorangan (individu dengan individu)**
2. **Antar individu dengan pemerintah suatu negara**
3. **Pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.”[[3]](#footnote-3)**

Kemudian menurut Huala Adolf, Perdagangan Internasional adalah Proses tukar menukar yang berdasarkan atas kehendak dari masing-masing negara sukarela. Tujuan dari perdagangan tersebut ialah untuk memperoleh manfaat perdagangan yaitu menambah pendapatan negara. Perdagangan Internasional meliputi transaksi jual-beli dengan negara lain.Hubungan Perdagangan Internasional berkembang karena setiap Negara memiliki sumber daya alam dan kondisi lingkungan berbeda-beda yang memberikan suatu keuntungan tertentu bagi suatu Negara yang tidak dimiliki oleh Negara lainnya.Pada kondisi terbaik, suatu Negara dapat menikmati keunggulan absolut (*absolut advantage*) jika Negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa tertentu dalam jumlah lebih besar dengan memanfaatkan jumlah input yang sama. Hal ini merupakan prinsip dasar berkembangnya perdagangan antar Negara, yang kemudian menghasilkan konsep keunggulan komparatif (*comparative advantages*). Teori Keunggulan Absolut atau mutlak ini dipelopori oleh Adam Smith yaitu:

**“Suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor suatu jenis barang tertentu, yang negara tersebut memiliki keunggulan mutlak (*absolut advantage*) dan tidak memproduksi atau melakukan ipor jenis barang lain yang negara tersebut tidak memilki keunggulan mutlak (*absolut advantage*) terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Dengan kata lain, suatu negara akan mengekspor (mengimpor) suatu jenis barang, jika negara tersebut dapat (tidak dapat) memproduksinya lebih dan efisien atau lebih murah dibandingkan negara lain.”[[4]](#footnote-4)**

Sedangkan Teori Keunggulan Komparatif dicetuskan oleh David Ricardo yang merupakan penyempurna terhadap teori Keunggulan Absolut yaitu:

**“Suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu, apabila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) terbesar, dan akan mengkhususkan diri pada impor barang, apabila negara tersebut memiliki kerugian komparatif (*comparative disadvantage*). Dengan kata lain, suatu negara akan melakukan ekspor barang, jika barang tersebut bisa diproduksi dengan biaya lebih rendah, dan akan melakukan impor, jika barang tersebut diproduksi dengan biaya lebih tinggi.”[[5]](#footnote-5)**

Berdasarkan konsep tersebut, suatu Negara yang tidak memiliki keunggulan absolut apapun dalam memproduksi dua atau lebih barang dan jasa masih tetap dapat menghasilkan suatu keunggulan komparatif dengan cara mengembangkan spesialisasi dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Lebih lanjut menurut konsep tersebut, dengan melakukan perdagangan barang, masing-masing Negara memiliki suatu keunggulan comparative dalam memproduksi, total kuantitas barang yang diproduksi dapat ditingkatkan, yang memungkinkan total konsumsi juga meningkat. Oleh karena itu, pada kondisi normal, perdagangan bebas akan menghasilkan keuntungan bersama bagi seluruh Negara. Walaupun pada kenyataannya, teori perdagangan tersebut tidak selalu berlaku pada prakteknya.

Kebijakan perdagangan suatu Negara sangat ditentukan oleh ketersediaan input produksi yang dimilikinya yang meliputi sumberdaya alam, tenaga kerja, dan capital (termasuk didalamnya inovasi dan teknologi). Ekspor didorong untuk barang-barang yang produksinya memerlukan input yang tersedia secara berlimpah di dalam negeri. Sementara bagi barang-barang yang produksinya memerlukan input yang langka ketersediaannya di dalam negeri akan lebih cenderung untuk diimpor. Dalam hal ini, bagi Negara-negara yang ekonominya lebih bergantung pada sektor yang bertumpu pada faktor produksi yang bersifat langka (*scarce-factor-intensive sector*), mekanisme proteksi yang meliputi skema tariff dan non-tarif cenderung diberlakukan. Sementara negara-negara yang ekonominya bertumpu pada faktor produksi yang berlimpah ketersediaannya (*abundant-factor-intensive sector*) cenderung mendukung perdagangan bebas. Hanya bagi Negara-negara yang ekonominya bertumpu pada *scarce-factor-intensive sector*, system perdagangan bebas cenderung ditentang, walaupun pada sisi lain kelompok negara ini juga berupaya mendorong peningkatan eksport untuk *abundant-factor-intensive goods* yang mereka miliki.

Perdagangan Internasional sendiri telah memunculkan filsuf ekonomi yang disebut Merkantilisme. Merkantilisme ini dipelopori oleh beberapa tokoh yakni Sir Josiah Child, Thomas Mun, Jean Bodin, Von Hornich dan Jean Baptiste Colbert. Merkantilisme juga dikenal dengan istilah lain seperti nasionalisme ekonomi, ekonomi politik, proteksionisme, serta isolasionalisme. Merkantilisme adalah suatu aliran/filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad XVIs.d. XVIII di Eropa Barat. Ide pokok Merkantilisme sebagai berikut:

**“a. Suatu negara/raja akan kaya raya/makmur dan kuat bila ekspor lebih besar dari pada impor (X> M).**

**b. Surplus yang diperoleh dari selisih (X-M) atau ekspor neto yang positif tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia (LM), terutama emas dan perak dari luar negeri.**

**c. Pada waktu itu LM (emas maupun perak) digunakan sebagai alat pembayaran (uang), sehingga negara/raja yang memiliki LM yang banyak akan kaya/makmur dan kuat.**

**d. LM yang banyak tersebut digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama.**

**e. Penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri ini diikuti dengan kolonisasi di Amerika Latin, Afrika dan Asia terutama dari abad XVI s.d. XVIII.”[[6]](#footnote-6)**

Hingga saat ini teori Merkantilisme masih digunakan oleh berbagai negara, namun dalam bentuk Neo-Merkantilisme yakni merupakan perkembangan dari kebijakan Merkantilisme. Pengertian teori Neo-Merkantilisme yaitu kebijakan proteksi untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tarif atau *Trariff Barrier* (TB) dan kebijakan *Non-Tariff Barrier* (NTB). Biasanya *Tariff Barrier* (TB) dilaksanakan dengan menggunakan *countervailing duty,* bea anti *dumping* dan *surcharge*. Dalam hal ini, kebijakan proteksi yang lebih banyak digunakan biasanya dalam bentuk *Non Tariff Barrier* (NTB), seperti larangan, system kuota, ketentuan teknis, harga patokan (*customs value*), peraturan kesehatan/karantina dan lain-lain.[[7]](#footnote-7)

Sehingga memicu mulnculnya teori kebijakan proteksionsime. Tidak hanya negara berkembang saja yang menerapkan teori tersebut melainkan negara maju seperti Uni Eropa pun menerapkan kebijakan yang bersifat protektif. Pengertian dari Proteksionisme sendiri adalah upaya suatu negara untuk merumuskan kebijakan ekonomi sedemikian rupa dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari dominasi produk-produk asing.[[8]](#footnote-8) Teori Proteksionisme ini dipelopori oleh seorang ilmuan kelahiran Reutlinngen, Wuttemberg, Jerman yakni bernama Friedrich List.

Indonesia merupakan salah satu produsen utama *Crude Palm Oil* (CPO) dunia pada tahun 2006, sehingga permintaan produk olahan kelapa sawit Indonesia terus menigkat. Salah satu negara tujuan ekspor Indonesia adalah Uni Eropa. *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan bahan baku biodiesel yang banyak diimpor oleh Uni Eropa. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pemerintah sejumlah Negara UE terhadap keberlanjutan pertanian mereka sebagai produsen terbesar komoditas biji kanola (*rapeseed*), biji bunga matahasi, dan kedele. Sehingga pihak UE melancarkan sejumlah propaganda dengan melibatkan berbagai lembaga non-pemerintah (NGOs) dalam rangka upaya menghambat masuknya *Crude Palm Oil* (CPO) ke pasar mereka, yang akhir-akhir ini marak dikenal sebagai “*Negative Campaign*”. *Negative Campaign* atau kampanye negatif adalah sebuah upaya terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih. Kampanye negatif selalu menggunakan metode sindiran, rayuan yang merusak , atau rumor yang mengenai para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan citra yang buruk terutama dalam hal kebijkan publik. Upaya-upaya itu diusahakan agar menimbulkan resistensi para pemilih.[[9]](#footnote-9)

Maka dari itu dibutuhkannya upaya diplomasi guna menyelesaikan permasalah tersebut. Menurut Sir Ernest sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya.[[10]](#footnote-10) Bentuk diplomasi yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan ini adalah *soft diplomacy*. *Soft Diplomacy* merupakan cara atau langkah yang digunakan oleh suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan menggunakan pendekan sosial, budaya, melalui kebijakan luar negerinya, dan sebagainya tanpa ada unsur kekerasan pemaksaan didalamnya.

Keberhasilan kegiatan diplomasi dapat dinilai dari tujuan awalnya. Diplomat melakukan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara saling tukar menukar informasi secara terus menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Tujuan persuasif antar negara adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku lawannya.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis membuat beberapa asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Tidak adanya upaya yang dilakukan oleh petani kelapa sawit Indonesia untuk meningkatkan standar dan kualitas.
2. Belum maksimalnya upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan dan memenuhi standar pasar Uni Eropa guna menghilangkan isu *Negative Campaign* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.
3. Petani produsen minyak biji bunga matahari, biji kanola, dan kedele dapat memenuhi kebutuhan industri pengolahan minyak nabati di Uni Eropa.
4. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah diatas, maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

**“Dengan munculnya *Negative Campaign* yang dilakukan oleh Uni Eropa, maka Indonesia akan melakukan sejumlah penyesuaian berupa penerapkan sistem sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia/*Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam proses produksi CPO agar dapat memenuhi tuntutan standar di pasar Uni Eropa.”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Tabel 2

Tabel Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| ***Variabel Bebas:***  Dengan munculnya *Negative Campaign* yang dilakukan oleh Uni Eropa. | 1. CPO Indonesia tidak ramah lingkungan. | 1. Produksi kelapa sawit yang tidak sesuai dengan regulasi termasuk perusakan hutan atau deforestasi, serta hilangnya sumber hidup spesies terancam punah seperti harimau Sumatra dan orang hutan.   (<https://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/558704/Laporan_Izin_untuk_Memusnahkan.pdf>) |
| 1. Melindungi minyak nabati domestik. | 1. Penjelasan mengenai langkah yang diambil oleh Uni Eropa merupakan bentuk protesionisme terhadap rapeseed, bunga matahari, dan kedelai yang kalah bersaing dengan minyak sawit.   (<http://www1.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=424>) |
| ***Variabel Terikat:***  Maka Indonesia akan melakukan sejumlah penyesuaian berupa menerapkan sistem sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia/*Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam proses produksi CPO agar dapat memenuhi tuntutan standar di pasar Uni Eropa. | 1. Pemerintah Indonesia membentuk kebijakan ISPO (*Indonesian Sustainable Pal*m *Oil System*) yakni standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara. | 1. Penjelasan tentang fungsi sertifikasi dan pentingnya industri kelapa sawit berkelanjutan.   (<http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842>) |
| 1. Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi guna hadapi isu yang dihembuskan oleh Uni Eropa. | 1. Penjelasan tentang upaya diplomasi Pemerintah Indonesia untuk membuktikan bahwa tuduhan Uni Eropa terhadap CPO Indonesia adalah salah, sehinggal CPO Indonesia mampu masuk ke pasar Uni Eropa.   (<http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2481336970842>) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Gambar 1.

Skema Kerangka Teoritis

**Perdagangan Internasional**

**Hubungan Bilateral**

**Indonesia**

**Uni Eropa**

**CPO Indonesia kehilangan Daya Saing di Pasar Uni Eropa**

**Melindungi & Mengembangkan Industri Minyak Nabati Domestik Berbasis Bahan Baku Produksi**

**Mengeluarkan isu *Negative Campaign* berupa proteksi Terhadap Petani Produsen Bahan Baku Lokal (Biji Kanola, Biji Bunga Matahari, danKedelai)**

**Mencari Pasar Alternatif di Luar Uni Eropa**

**Hambatan Impor Bagi Sumber Minyak Nabati Alternatif (Contoh: CPO):**

**Tarif Tinggi SertaHambatan Teknis & Kampanye Negatif**

**Menyesuaikan sistem produksi CPO untuk Memenuhi Tuntutan Standar Pasar Uni Eropa**

**Petani Lokal Terlindungi, tetapi harga minyak nabati alternative (CPO) menjadi mahal**

**Indonesia melakukan diplomasi dengan Uni Eropa agar CPO dapat masuk ke pasar Uni Eropa**

**Jika pasokan lokal terbatas, harga produk mahal, dan dampaknya konsumen lokal terbebani**

1. Joshua Goldstein dalam Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori HUbungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Agustus 2017), hal 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sukawarsini Djelantik, *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal 294. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional “Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor”* (Yogyakarta: MEDIATERA, 2015), hal 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Adam smith dalam Imamul Arifin dan Giana Hadi W., “*Membuka Cakrawala Ekonomi 2*” (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hal 65. [↑](#footnote-ref-4)
5. David Ricardo dalam Imamul Arifin dan Giana Hadi W., “*Membuka Cakrawala Ekonomi 2*” (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hal 66. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sattar, S.E., M.Si., *Buku Ajar Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2017), hal 33. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, hal 34. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D., *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal 57. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dodik Prasetyo, “Kampanye Negatif, Praktik Terselubung Pilkada” Jawapos (online), October 14, 2017, dalam <http://www.jawapos.com/baliexpress/read/2017/10/14/19554/kampanye-negatif-praktik-terselubung-pilkada>, diakses 14 October 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sir Ernest Satow dalam Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal 3-4. [↑](#footnote-ref-10)
11. Barry Fulton dalam Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal 14. [↑](#footnote-ref-11)